

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang sedang menghadapi suatu masalah hukum di dalam persidangan. Pengertian Advokat sendiri telah di jelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Suhrawandi K. Lubis menjelaskan bahwa “Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), seta nasihat hukum (*legal advice*) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya *unsich (secara ambisius)*”.¹ Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukan secara cuma-cuma (*Prodeo*) ataupun atas dasar mendapatkan honorarium (*Lawyer Fee*) dari kliennya

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa, “Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi

¹ Suhrawandi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 28.

itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.”²

“Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi jaksa, hakim dan advokat”.³

Dalam perkembangan zaman dan di tengah krisis multidimensi, kehidupan hukum menunjukkan fenomena adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pihak yang sering disalahkan sebagai penyebab runtuhnya supremasi hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, hakim, advokat, dan jaksa.

Kegagalan penegakan hukum akibat ketidakmampuan aparat penegak hukum, menurut pengamatan kami, karena kecenderungan aparat penegak hukum selama ini cenderung pasif dan hanya berusaha memenuhi target atasan semata ketimbang melakukan penegakan hukum secara benar sesuai hukum yang berlaku.⁴

Disinilah eksistensi advokat menjadi sangat penting sebagai bagian dari elemen yang ikut serta dalam penegakan hukum di pengadilan. Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme, sehingga sebagai advokat yang mengemban tugas mulia harus memiliki independensi yang kuat, tidak terikat pada klien dan tidak pandang bulu, siapa lawan kliennya, golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya. Akan tetapi, kenyataannya orang-orang yang menggeluti profesi Advokat seringkali tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa terjadi karena adanya faktor di luar dirinya yang begitu kuat atau terkadang juga karena penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya. Satjipto Raharjo berpendapat di

² Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 74.

³ *Ibid.* Abdulkadir Muhammad. Hal 65.

⁴ Amir Syamsuddin. 2008. *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Jaksa Polisi, dan Pengacara*. Jakarta. Buku Kompas. Hal. 10.

dalam bukunya yang berjudul *Hukum Masyarakat dan Pembangunan* bahwa :
 “peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak tersangka/terdakwa”.⁵ Satjipto Raharjo menjelaskan :
 “Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum, maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan perwujudan dari cita-cita para advokat yang terus berjuang untuk menempatkan advokat sejajar dengan penegak hukum lain”.⁶

Untuk menjamin idealisme advokat terdapat kode etik advokat sebagai hukum tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi, dan agar advokat dapat bertanggung jawab atas segala perilaku dan tindakan yang diperbuat. Dengan kata lain pada dasarnya seorang advokat dalam menjalankan tugasnya perlu adanya etika profesi yang mengatur dan mengawasi segala sesuatunya termasuk dengan tingkah laku advokat itu sendiri dalam beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Namun idealnya cita-cita Undang-Undang dan Kode Etik Advokat tidak sejalur/ linier dengan fakta dilapangan, hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berita di bawah ini yang menunjukkan bahwa hal tersebut dapat di katakan *Das sollen* dan *Das sein* tidak sejalan dengan tujuannya. Adapun realita yang terjadi dalam praktek, adalah sebagai berikut :

⁵ Satjipto Raharjo. 1976. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung. Alumni. Hal. 104.

⁶ V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta. Erlangga. Hal. 4.

SURABAYA – Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim memecat enam anggotanya yang ditengarai melanggar kode etik dan undang-undang advokat. Selanjutnya, enam advokat tersebut tidak bisa menjalankan tugas memberikan pendampingan hukum. Selain memecat enam anggota, Peradi Jatim memberikan sanksi kepada 25 anggota lainnya yang juga melakukan pelanggaran kode etik. Sanksinya berupa skors. Rentang waktunya beragam, 3–12 bulan. "Sanksi itu sesuai dengan tingkat kesalahannya," ujar Ketua Dewan Kehormatan Peradi (DKP) Jatim Pieter Talaway kemarin (12/5). Enam pengacara yang dipecat tersebut adalah Gedijanto SH MH CD, A. Faisal SH (alm), dan Ir Edward Rudy SH. Kemudian, Hairandha Suryadinata SH, Albert Riyadi Suwon SH MKn, dan Drs Soka SH MH. Advokat yang dipecat tersebut sebenarnya bukan orang baru. Mereka cukup tenar dan sudah lama praktik. "Sebenarnya berat, namun langkah ini harus diambil," ungkap Pieter. Keputusan pemecatan itu turun langsung dari Dewan Kehormatan Peradi Pusat. Sebelumnya, mereka disidang oleh DKP Jatim. Surat keputusan sanksi tersebut juga diteruskan ke Mahkamah Agung, Kejaksaan Negeri, Kemenkum HAM, dan pengadilan negeri se-Indonesia. Dengan begitu, pihak-pihak terkait bisa mengetahui anggota peradi yang terkena sanksi. "Khususnya yang dilakukan pemecatan," katanya. Langkah itu diambil agar masyarakat mengetahui bahwa Peradi memiliki dewan pengawas. Dewan pengawas tidak segan mengambil langkah tegas kepada advokat yang melanggar. "Agar pengacara tidak semena-mena menjalankan tugasnya," tegas Pieter. Lantas, bagaimana apabila anggota yang disanksi tersebut loncat ke organisasi advokat lain? Menurut Pieter, organisasi lain pasti juga menjunjung kode etik profesi advokat. Mereka tidak mungkin menerima anggota baru yang bermasalah dengan kode etik dan Undang-Undang Advokat. "Jangan sampai mencederai organisasi sendiri dengan menerima advokat bermasalah," ucapnya. Sementara itu, sejak 2010, terdapat 63 advokat yang dilaporkan masyarakat. Dari jumlah tersebut, tinggal satu yang sedang dalam proses banding. Kasus yang paling sering terjadi adalah menelantarkan klien, main hakim sendiri, menjerumuskan klien sehingga masuk proses pidana, sampai menipu klien.⁷

Berdasarkan sumber dari media online yang terpercaya bahwa sudah ada 6 (enam) orang advokat daerah Jawa Timur yang di pecat dari jabatannya dengan berbagai kasus. Yang menjadi persoalan adalah apakah selama ini

⁷ Jawa Pos. 2017. *Langar Kode Etik, Enam Pengacara Dipecat*. Jawa Pos. <https://www.pressreader.com>. diakses tanggal 28 November 2017

sanksi etik yang di berikan kepada para pelanggar kode etik khususnya profesi advokat ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang telah ada. Apakah selama ini sudah efektif dan sejauh mana undang-undang tersebut mengikat para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Melihat dari kasus tersebut bahwa para pelanggar kode etik profesi advokat adalah para advokat yang cukup terkenal dan biasa di anggap sebagai senior, namun apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Dewan Kehormatan Daerah (DPD) Peradi Jawa Timur memiliki pertimbangan hukum dan alasan yang kuat sehingga dapat memutuskan bahwa 6 (enam) orang advokat tersebut di pecat dari jabatannya sebagai advokat, Berkaitan dengan sanksi kode etik profesi advokat diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa ada beberapa point yang apabila seorang advokat melanggar kode etik profesi advokat maka akan di kenakan sanksi ringan hingga berat, begitu pula sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Karena itu, sebetulnya jenis hukuman yang berkaitan dengan kode etik tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Pengaturan hukuman tersebut sebenarnya berlebihan karena kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran kode etik berada pada Dewan Kehormatan. Akan tetapi, hal tersebut tetap patut dihargai karena, dari sudut asas publisitas pengaturan tersebut berperan sebagai medium penyampaian kepada masyarakat bahwa ada rambu-rambu tertentu yang harus di patuhi oleh advokat.⁸

Beberapa bulan sejak terbitnya kabar berta dari media online tersebut muncul adanya kabar berita dari media online lain yang menyebutkan bahwa ada salah satu advokat yang telah diputus tidak boleh beracara di persidangan

⁸ *Op.cit.* V. Harlen Sinaga. Hal. 109

maupun menjabat di organisasi atau perhimpunan Advokat oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jawa Timur, saat ini advokat tersebut malah menjabat sebagai ketua KAI. Beritanya sebagai berikut :

SURABAYA - Gonjang-ganjing terkait pemecatan terhadap Enam advokat anggota Peradi Jatim dipastikan tidak bisa berjalan secara efektif. Ini setelah Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jatim resmi melakukan pemecatan lantaran melanggar Kode Etik dan Undang – Undang Advokat. Enam pengacara yang dipecat Peradi adalah, : Gede alias Gedyanto, SH. MH. CD, A. Faisal, SH (alm), Ir. Edward Rudy, SH, Hairandha Suryadinata, SH, Albert Riyadi Suwon, SH. M.Kn dan Drs SOKA, SH MH. Bahkan, Edward Rudy yang dipecat menjadi anggota Peradi, malahan diangkat menjadi Ketua KAI (Kongres Advokat Indonesia) Cabang Surabaya. Namun, Purwanto, Wakil Ketua DPC Peradi menilai keputusan Dewan Kehormatan Peradi tidak mempunyai sifat eksekutorial dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dapat dilaksanakan di lapangan, sehingga fungsi Dewan Kehormatan diharapkan menjadi pengayom dan melindungi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak perlu memberikan sanksi pemecatan sepanjang tidak melakukan pelanggaran berat. H. Abdul Malik, SH. MH, Ketua DPD KAI Jatim yang dihubungi menyatakan sebenarnya melakukan pelanggaran atau '*penyerobotan*' terhadap ratusan keanggotaan KAI yang dilakukan ujian 'verifikasi' di Jakarta beberapa tahun silam. Menurut Abah Malik panggilan akrabnya, sebelum merekrut anggotanya diteliti dulu siapa yang bisa diangkat menjadi anggotanya dan bukan anggota advokat organisasi lainnya yang diangkat. "Saya mempunyai bukti, bahwa mereka melakukan penyerobotan keanggotaan organisasi kami (KAI), " ujarnya menegaskan, Rabu, (2/8). Seperti diberitakan, "Nantinya advokat yang dikenai sanksi tidak bisa menjalankan tugasnya memberi pendampingan hukum, " kata Ketua Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur, Pieter Talaway, beberapa waktu lalu. Advokat yang dipecat ini, ujar Pieter, sebenarnya bukan orang baru. Mereka memiliki nama dan sudah praktek lama. "Pemecatan ini juga turun langsung dari pusat. Sebenarnya berat, namun langkah ini harus diambil," ujarnya. Selain memecat enam anggotanya, Peradi Jatim juga memberikan sanksi pada 25 anggota lainnya yang juga bertindak di luar kode etik. "Sanksi ini berupa skorsing dengan masa waktu beragam sesuai dengan kesalahannya, " ujarnya. Langkah ini, lanjut Pieter, diambil agar masyarakat mengetahui bahwa Peradi memiliki dewan pengawas terhadap tindakan profesi advokat. "Ini pelajaran buat kita semua. Agar pengacara tidak semena-mena menjalankan tugasnya," tegas Pieter. Surat keputusan sanksi ini akan diteruskan ke Mahkamah Agung, seluruh Pengadilan se Indonesia.

Sehingga anggota Peradi yang terkena sanksi khususnya pemecatan tidak bisa melakukan pekerjaan advokat selama sanksi berjalan. Disinggung, kemungkinan jika anggota tersebut loncat ke organisasi advokat lainnya ? Menurut Pieter, organisasi lain pasti juga menjunjung Kode Etik Profesi Advokat. "Tidak mungkin menerima anggota baru yang bermasalah dengan kode etik dan Undang-Undang Advokat, ucapnya.

ANULIR SANKSI

Sanksi pemecatan Dewan Kehormatan (DK) Peradi Jatim terhadap Advokat Eduard Rudy pada 14 November 2015 lalu ternyata meninggalkan sejumlah kejanggalan. Majelis Kehormatan DK Peradi yang menyidangkan perkara ini ternyata mengesampingkan azas praduga tak bersalah atas aduan Wiwik Wijayanti yang mengaku telah diperas Rp 1 miliar dan ditipu oleh Eduard Rudy. Laporan itu diadukan ke DK Peradi Jatim pada 20 Juni 2014 lalu. Sebelumnya, Pada 24 April 2014, Pemilik penggilingan padi UD Tambah Jaya asal Mojokerto ini juga melaporkan Eduard Rudy ke Polda Jatim. Perbuatan pidana pemerasan dan penipuan yang ditudingkan ke Eduard Rudy tidak terbukti, Pada 26 September 2014, Polda Jatim menerbitkan surat penghentian penyidikan atau SP3 Nomor B/1430/SP2HP-6/IX/2014/Ditreskrimum. Dijelaskan dalam SP3 tersebut, Laporan Wiwik dinyatakan tidak cukup bukti. Di sinilah letak kejanggalannya, SP3 itu tak menjadi ajuan bagi DK Peradi Jatim untuk menjatuhkan sanksi. Dan pada 14 November 2014, Edward Rudy dinyatakan menyalahi etika profesi dan dijatuhi sanksi pemecatan. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPC Peradi Surabaya, Purwanto menilai, sanksi yang dijatuhkan DK Peradi Jatim kepada Edward Rudy dan beberapa advokat lainnya haruslah dianulir. "Bukan cuma itu, nama baiknya secara otomatis juga ikut direhabilitasi. DK Peradi, jangan menggunakan pola *like and dislike* dalam menjatuhkan sanksi yang dijatuhkan," ujarnya saat dikonfirmasi *Soerabaya Newsweek*, Kamis, (3/8) melalui ponselnya. Dia meyakini, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi Peradi ini otomatis tidak dapat dilaksanakan, karena Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi lembaga pengadil tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan sumpah advokat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan UU Advokat. Dijelaskan Purwanto, akibat perpecahan ditubuh Peradi, Banyak nasib para Advokat yang terhukum karena palu hakim DK Peradi menjadi menggantung. Kendati demikian, sanksi tersebut tak membuat para advokat yang tersanksi tidak bisa beracara lagi. "Sanksi itu berlaku untuk internal organisasi, mereka masih bisa beracara, apalagi dengan adanya perpecahan ditubuh Peradi menjadi tiga kubu, yaitu; Kubu Fauzi Hasibuan, Junimart Girsang dan Luhut M. Pangaribuan," cetusnya. Organisasi Peradi yang awalnya, diharapkan

menjadi organisasi tunggal advokat malahan menambah organisasi-organisasi advokat lama tumbuh kembali, seperti; Organisasi Peradin, bisa mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi (PT). Peradin adalah organisasi sebelum Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) yang diprakarsai oleh Advokat, Harjono Tjitrosoebono, hidup lagi dengan singkatan nama yang berbeda, imbuhnya. Ditambahkan oleh Purwanto, beberapa advokat yang telah dijatuhi sanksi pemecatan oleh Peradi sudah tidak relevan lagi. Misalnya, A.Faisal sudah meninggal dunia. Gedyanto alias Gede sudah sakit-sakitan dan tidak menjalankan profesinya sebagai advokat. Sedangkan, Edward Rudy, Albert Riyadi Suwon dan Soka telah beralih menjadi advokat pada organisasi di luar Peradi tidak menemui kendala di lapangan. Untuk itu, dia berharap ada revisi UU Advokat baru agar organisasi advokat menjadi wadah tunggal bagi advokat. Ditempat terpisah, Edward Rudy sendiri mengaku tidak merasa dirugikan oleh keputusan Majelis Dewan Kehormatan Peradi, karena sebelum sidang tersebut diputuskan saya mengundurkan diri dari persidangan tersebut karena saya anggota KAI sehingga tidak layak organisasi Peradi memberikan sanksi organisasi kepada saya yang bukan anggotanya, katanya menandaskan. “Dan, saya telah diangkat menjadi advokat oleh organisasi KAI sejak tahun 2010 yang ditandatangani oleh Indra Sahnun Lubis, ucapannya sembari menunjukkan surat pengangkatan sebagai advokat KAI,” ujarnya menegaskan.⁹

Berarti sampai disini ada keganjalan terhadap putusan Dewan Kehormatan

Daerah Peradi tersebut dan patut di pertanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi melihat kondisi dari Ir. Edward Rudy telah di beri sanksi pemecatan oleh Dewan Kehormatan namun masih dapat beracara. Berbicara tentang efektifitas maka melihat kondisi yang seperti ini patut untuk di pertanyakan pula apakah putusan dari Dewan Kehormatan Daerah mempunyai sifat eksekutorial, jawabannya adalah tidak karena yang memiliki sifat eksekutorial adalah Dewan Kehormatan Pusat. salah satu pemicu tidak efektifnya sanksi yang di jatuhkan akibat dari diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik

⁹Soerabaia Newsweek, *Peradi Surabaya Mandul, Enam Advokat Dipecat Bisa Praktek*. <http://www.surabayanewsweek.com/2017>. Diakses tanggal 10 Desember 2017

Indonesia Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015, Perihal Peyumpahan Advokat.¹⁰

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut maka efektifitas sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia semakin dipertanyakan perihal sanksi pemecatan,

Jadi penulis berpendapat bahwa disini Dewan Kehormatan Daerah tidak memiliki sifat eksekutorial, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul **EFEKTIFITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT (Studi di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Kota Surabaya)** Guna menyelaraskan/ meluruskan keganjalan hukum yang ada berdasarkan fakta dilapangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apasaja Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat di Organisasi Peradi Provinsi Jawa Timur ?
2. Bagaimana Efektifitas Sanksi Yang di Jatuhkan Terhadap Advokat Organisasi Peradi Provinsi Jawa Timur Apabila Melanggar Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia ?

¹⁰ Bahwa berdsarakan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokonya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Organisasi Peradi Provinsi Jawa Timur
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Sanksi Yang di Jatuhkan Terhadap Advokat Organisasi Peradi Provinsi Jawa Timur Apabila Melanggar Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, di harapkan dapat lebih memahami faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi advokat dan mengetahui efektifitas sanksi yang dijatuhkan terhadap kepada advokat yang melanggar kode etik
2. Bagi Akademisi, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan para kaum akademis agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian dimasa mendatang, khususnya dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat.
3. Bagi Penegak Hukum, diharapkan penelitian ini berguna untuk gambaran bagi pihak yang berkepentingan mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga untuk saling menegakan kode etik profesi secara bersama-sama. dan diharapkan sebagai pedoman bagi calon advokat maupun advokat baru untuk menjalankan peranan profesinya.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan setelah membaca penelitian ini mengerti tentang faktor penyebab pelanggaran advokat dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran advokat dan agar dapat ikut serta melakukan

pengawasan terhadap kinerja advokat kedepannya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penulisan ini adalah untuk mengungkap secara obyektif berdasarkan kemampuan daya nalar dan acuan melalui langkah – langkah atau metode ilmiah tentang efektifitas sanksi etik yang di jatuhkan terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat .

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri, dan juga merupakan masukan bagi badan hukum terkait untuk menerapkan efektifitas sanksi etik di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat.

F. Metode Penulisan

Bentuk Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Lapangan (*Socio Legal Research*), Penelitian tentang efektifitas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat dalam menjalankan profesi advokat yang profesional (Studi di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Kota Surabaya) jadi dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan *sosial empiris* atau *sosio legal research*. Menurut Mardzuki penelitian *sosial empiris* atau *sosio legal research* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karenanya, dalam penelitian ini selalu dikaitkan masalah sosial.¹¹

¹¹ Piter Mahmud Marjuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Pradana Media Grup. Hal. 87.

Sementara Nasution berpendapat titik tolak penelitian sosial empiris atau sosio legal research adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Faktor sosial adalah suatu kebiasaan pedoman perilaku.¹²

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa dokumen putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jawa Timur dan wawancara kepada beberapa advokat yang berada di lapangan, sesuai dengan fakta dilapangan yang akan dijadikan sebagai bahan utama dalam penulisan hukum ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku literature yang membahas tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang terkait Advokat
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Jurnal, Media Online yang komprehensif, KBBI dan Kamus

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam peulisan hukum ini digunakan sistematika pembagian kedalam 4 Bab dengan masing-masing Bab terdiri dari atas sub yang bertujuan untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

¹² Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. Mandar Maju. Hal. 124.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori hukum sebagai pisau analisis dari permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang judul

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data-data dari penelitian dan permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisi saran tentang permasalahan yang diteliti

